

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pangkep Tahun 2013-2014)

OLEH:

MUH. AKBAR ALI

B 111 07 918

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pangkep Tahun 2013-2014)**

**OLEH:
MUH. AKBAR ALI
B 111 07 918**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pangkep Tahun 2013-2014)

Disusun dan diajukan oleh

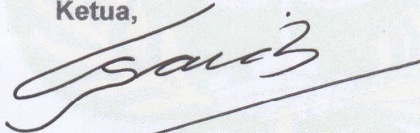
MUH. AKBAR ALI

B 111 07 918

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 31 Oktober 2014
Dan Dinyatakan Diterima

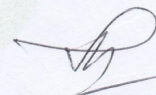
Panitia Ujian

Ketua,



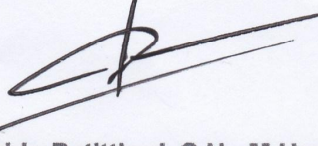
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 1 001

Dekan,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsil Mahasiswa

Nama : MUH. AKBAR ALI

Nomor Induk : B 111 07 918

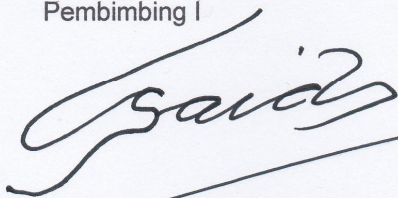
Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pangkep Tahun
2013 - 2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

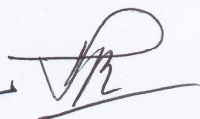
Makassar, Oktober 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 004

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nam : **MUH. AKBAR ALI**

No. Pokok : B111 07 918

B a g i a n : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pangkep Tahun 2013-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2014



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NPM. 19671231 199103 2 002

ABSTRAK

Muh. Akbar Ali (B 111 07 918) Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2014). Di Bimbing Oleh Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. dan Hj. Haeranah, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep. serta Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Pangkep adalah faktor ketidakdisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukan tindakan berupa teguran, penyitaan dan penilangan.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan ialah, Melihat pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka dengan ini pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan aturan dalam berlalu lintas agar tahun-tahun berikutnya jumlah pelanggaran semakin berkurang sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap aturan berlalu lintas. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah harus ditingkatkan mengingat angka pelanggaran yang dilakukan oleh anak masih sangat tinggi serta Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar yang tidak patuh terhadap aturan. Diharapkan pemerintah menambah dana yang dianggarkan demi terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan kepolisian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pangkep Tahun 2013 - 2014)"***. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Drs. Muh. Ali Palenne** dan Ibunda **Erni Tahir Gani** atas segala perjuangan mendidik dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis **Andini Dewi Arimbi Ali, Ajeng Cahyani Ali** serta seluruh Keluarga Besar

yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.** dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Ibu **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** beserta segenap dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan

waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**, Ibu **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.**, dan Ibu **Hj. Nur Aziza S.H., M.H.** selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh **Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasehat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kepala **Kepolisian Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan** beserta segenap staf.
9. Bapak **Dr. Andi Syamsu Alam, M.si.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan Dalam Kuliah Kerja Nyata Angkatan 87. serta rekan-rekan **KKN Gelombang 87 Kecamatan Ajangale Khususnya Desa Amessangeng**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap selalu belajar dan atas kebersamaan selama 2 bulan di lokasi KKN.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. آمين

Makassar, 31 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi	9
1. Kriminologi dan Ruang Lingkupnya	9
2. Teori-teori Kriminologi	15
B. Pengertian Pelanggaran	17
C. Pengertian Lalu Lintas	20
1. Pelanggaran Lalu Lintas	23
2. Klasifikasi Pelanggaran lalu Lintas	24
D. Pengertian Remaja	29
1. Aspek Perkembangan Remaja	30
2. Kenakalan Anak Remaja	32
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Remaja Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pangkep	44
B. Faktor-faktor Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pangkep	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial masyarakat saat ini sangat bervariasi seiring dengan kemajuan zaman. Berbagai macam perubahan, mulai dari perubahan sosial, perubahan nilai, sampai pada perubahan pola tingkah laku dan hidup dianggap sebagai suatu keharusan dalam mengikuti kemajuan zaman.

Remaja yang notabene tergolong sebagai anak dalam perspektif hukum berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan anak, dan juga termasuk orang dewasa dalam perspektif sosial seringkali menjadi objek kemajuan yang diperlihatkan zaman sekarang ini. Saat ini remaja telah akrab sebagai pelaku yang diperlihatkan zaman kepada mereka.

Persoalan remaja yang berada di negara maju dan yang berada di negara berkembang jelaslah berbeda dari sisi kehidupan sosial dan pola tingkah laku. Pada tataran negara-negara yang tergolong maju, masyarakat khususnya anak-anak remaja cenderung melakukan kenakalan atau penyimpangan seperti mabuk-mabukan, balapan liar di tengah jalan, perkelahian antar gang (kelompok), berjudi, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Tindakan-tindakan delinkuen tersebut adalah pengaruh kemajuan teknologi, transportasi, mekanisasi,

industrialisasi, dan urbanisasi yang begitu kompleks sehingga menimbulkan berbagai masalah di negara maju tersebut.

Sedangkan pada tataran negara berkembang, justru masyarakat khususnya anak-anak remaja lebih cenderung melakukan kenakalan atau penyimpangan yang bersifat konvensional. Seperti berbuat cabul terhadap lawan jenis, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, menggelapkan barang orang lain, termasuk juga mabuk-mabukan, judi, balapan liar, melanggar lalu lintas, dan sebagainya. Semuanya merupakan cermin perilaku yang diperlihatkan oleh remaja masa kini. Jadi, pada negara berkembang kejahatan lebih banyak terjadi dalam masyarakat primitif atau di desa-desa.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa seringkali yang membuat remaja saat ini melakukan kenakalan atau penyimpangan karena mengikuti perkembangan sebagai hasil dari kemajuan zaman. Remaja yang secara psikologis masih berada dalam kondisi labil masih menangkap hal-hal baru begitu saja, karena belum bisa menyaring hal-hal positif ataupun negatif. yang datang atau yang diterima oleh mereka secara akal sehat.

Kemajuan zaman saat ini juga berdampak pada permintaan masyarakat terhadap pasar akan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Seperti yang kita amati saat ini di negara kita Indonesia tiap hari kita melihat betapa banyaknya jumlah kendaraan saat ini yang mewarnai dunia transportasi kita. Tidak hanya kendaraan roda empat,

terlebih lagi kendaraan roda dua. Seperti yang kita lihat saat ini, masyarakat begitu mudahnya memiliki kendaraan bermotor, padahal dulunya untuk memiliki sebuah sepeda motor mungkin terbilang sulit karena faktor ekonomi, apalagi yang akan menggunakannya adalah remaja atau anak-anak.

Bahkan saat ini masyarakat kalangan menengah ke bawah pun tidak kesulitan untuk membeli sepeda motor. Semuanya merupakan akibat dari mudahnya proses pembelian, mulai dari proses administrasi sampai pada harga uang muka untuk motor cicilan begitu murah, sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli termasuk untuk memenuhi kebutuhan anak mereka.

Berdasarkan pengamatan yang selama ini Penulis amati pada daerah Penulis bertempat tinggal, remaja umumnya telah mempunyai kendaraan sepeda motor sebagai akibat dari kemudahan dalam mengakses pembelian sebuah sepeda motor. Bukan hanya siswa SMA dan SMP, bahkan siswa SD dan remaja yang putus sekolah pun mempunyai sepeda motor yang biasa mereka gunakan untuk berkumpul, bersantai, dan bahkan tidak jarang mereka balap-balapan tanpa menggunakan helm bersama kelompok mereka.

Remaja umumnya terlihat bebas dalam menggunakan sepeda motor. Mereka terlihat berani mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa menggunakan helm, bahkan umumnya mereka juga belum memiliki SIM, dan belum diberikan STNK oleh orang tua mereka untuk

dibawa bepergian. Kenakalan remaja juga tidak hanya terbatas pada hal tersebut di atas, mereka juga bahkan memodifikasi motor mereka. Ada yang sengaja merubah bentuk body standar yang telah ditentukan pabrik, mengganti velg, melepas kaca spion standar dan menggantinya dengan kaca spion yang lebih kecil, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan kaca spion, serta mengganti lampu utama sehingga bukan lagi lampu standar yang digunakan. Dan diantara motor-motor tersebut banyak motor yang baru. Hal ini sesuai bunyi Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

Jelaslah bahwa jika remaja memodifikasi sepeda motor mereka agar terlihat lebih unik dan melupakan komponen-komponen yang diperlukan sepeda motor untuk memenuhi standar kelaikan jalan, itu akan sangat membahayakan keselamatan berlalu lintas dari pengendara itu sendiri.

Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 lalu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan menyatakannya tidak berlaku lagi. Keberadaan Undang-Undang baru tersebut diharapkan akan memberikan regulasi

dalam dunia perlalulintasan dan mampu memecahkan persoalan-persoalan saat ini yang sulit dipecahkan.

Proses sosialisasi Undang-Undang baru tersebut pun tidak mudah, pasalnya ada beberapa hal baru yang ditekankan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan kaca spion standar motor bersangkutan, Pengendara juga diwajibkan menggunakan helm standar berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu utama kendaraan disiang hari berdasarkan bunyi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” (Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).

Kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja saat ini memang menjadi perhatian khusus untuk dikaji permasalahannya. Mengingat remaja masa kini sangat rentan dan kental akan permasalahan-permasalahan sosial yang melekat pada mereka. Stigma yang melekat pada diri remaja akan hal-hal negatif memang tak dapat disangkal. Mengingat mereka masih labil secara psikologis dan berada pada masa transisi status menuju kedewasaan.

Pengaruh media juga tak terlepas dalam membentuk mental dan karakter remaja masa kini. Mereka cenderung mencontoh hal-hal yang

mereka lihat di media dan mengaktualisasikan hal tersebut ke dalam sikap dan perilaku mereka. Sesuai dengan konteks yang akan dibahas oleh Penulis, remaja misalnya mencontoh perbuatan ugal-ugalan atau balapan di Jalan Raya tanpa menggunakan helm, menerobos lampu merah dan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang telah dipasang di sepanjang pinggir jalan.

Sementara di lain sisi setelah Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, pihak terkait dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut dalam hal ini satuan Lalu Lintas Polri telah melakukan usaha bersama dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, termasuk remaja. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak saja yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditentukan tersebut.

Oleh karena pelanggaran lalu lintas merupakan delik, yaitu pelanggaran Undang-Undang (*Wets delict*), maka berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai judul skripsi yaitu **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Remaja” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2014).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, antara lain:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diadakan antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pangkep.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran buat masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja mengenai faktor-faktor penyebab dan bagaimana penanggulangannya.

2. Dari segi praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap persoalan-persoalan perlalulintasan. Dan bagi aparat penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

1. Kriminologi dan Ruang Lingkupnya

Tindak Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah bersal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9). Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya.

Dari Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) memberikan defenisi bahwa "kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".

Selanjutnya Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, antara lain:

1. Antropologi
lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh

bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi
Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Ilmu tentang berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa.

1. Higiene Kriminil
Usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata penjatihan sanksi.
3. Kriminalistik (*policie scientific*)
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10-11).

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:11):

1. Sosiologi Hukum
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:11), definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Sementara itu, beberapa ahli yang berbeda pendapat dengan definisi yang ditegaskan oleh Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:11-12) diantaranya:

1. Paul Modigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
2. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
3. Wood berpendirian bahwa Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan

teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi objek studi kriminologi melingkupi (Topo Santoso dan Eva

Achjani Zulfa, 2001:13):

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Adapun Sudarto (1986:27) memberikan definisi kriminologi sebagai suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).

Membahas masalah kriminologi yang merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana, maka kita akan mengkaji lapangan ilmu ini secara kompleks, karena kriminologi tidak hanya

membahas masalah faktor-faktor mengapa orang melakukan kejahatan? Bagaimana cara penanggulangannya? Tetapi juga bagaimana reaksi masyarakat (sanksi) terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut?

Oleh karena itu di bawah ini akan diberikan definisi perihal kejahatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan hakikat dari kriminologi itu sendiri.

Berdasarkan tata bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:344), pengertian kejahatan adalah “perbuatan atau tindakan jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Adapun menurut Bonger (J.E. Sahetapy dan Reksodiputro, 1982:21) tentang kejahatan adalah:

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Selanjutnya R. Soesilo (1985:13) secara garis besar membagi kejahatan ke dalam dua bagian, antara lain:

- 1) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-

ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUH pidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

2) Kejahatan dari segi sosiologis

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.

Edwin H. Sutherland dan R. Cressey (Lilik Mulyadi, 2007:84) menyebutkan kriminologi sebagai *“the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws.”*

Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn McShane (Lilik Mulyadi, 2007:84-85) teori-teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Golongan teori abstrak dan teori-teori makro (*macro-theories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
2. Teori-teori mikro(*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
3. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur social dan bagaimana seorang menjadi jahat.

2. Teori-teori Kriminologi

Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan masyarakat antara lain adalah:

a. Teori *Differential Association*

Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930. Konkretnya, teori *differential association* berlandaskan kepada “*ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism and culture conflict theory.*”

Selanjutnya Sutherland (Lilik Mulyadi, 2007:88) mengartikan *differential association* sebagai “*The*

content of the patterns presented in association". Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.

b. Teori Anomi

Teori ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut Durkheim (Lilik Mulyadi, 2007:92) teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).

c. Teori *Sub-Culture*

Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Teori *sub-culture* ini dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Salomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

B. Pengertian Pelanggaran

Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”. Istilah pelanggaran (*overtreding; violation; contravention*) secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.

Pengertian di atas dalam kamus hukum hampir sama. Yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.

Sementara dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan;

menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.

Menurut Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (1989:74) pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wets delict*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukannya.

Pelanggaran Undang-Undang (*wets delict*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, misalnya, orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.

Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” (*overtreder; law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran Undang-Undang pidana.

Secara umum, KUHP kita memiliki sistematika pembagian kategori tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Undang-Undang hukum pidana kita dalam hal ini KUHP terbagi atas tiga buku. Yaitu buku I membahas masalah ketentuan umum (*Algemene Bepalingen*) dimulai dari Pasal 1 s/d 103, selanjutnya buku II membahas mengenai kejahatan (*misdriften*) mulai dari Pasal 104 s/d 488, dan terakhir buku III membahas mengenai pelanggaran (*overtredingen*) dari Pasal 489 s/d 569 KUHP.

Achmad Ali (1996:249) membedakan antara kejahatan dan pelanggaran:

Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran adalah delik pidana yang diatur dalam buku III KUHP. Di luar KUHP masih terdapat Undang-Undang yang terpisah dalam bidang hukum pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan.

A.S. Alam (2010: 21-22) menggolongkan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya ancaman pidana:

1. kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
2. pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi misalnya ada pelanggaran lalu lintas.

Dari penjelasan dan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran, merupakan sama-sama delik.

Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar hukum disepadankan dengan perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*). Digunakan istilah *unlawfulness* karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah "*onrechmatige daad*", sebagian lagi menggunakan istilah "*wederrechtelijk*".

Unlawfulness dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan illegal. Para pakar menggunakan istilahnya sendiri. Lamintang memakai

istilah “tidak sah”, Hazewinkel-Suringa memakai istilah *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan), sedangkan Hoge Rood memakai istilah *zonder eigenrecht* (tanpa hak).

Hoge Rood (Leden Marpaung, 2005:44) berpendapat:

onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat.

Senada dengan Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:44) yang berpendapat bahwa:

wederrechtelijk formil bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada Undang-Undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.

C. Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut : “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas

dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.”

Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan.

Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992. UU No. 14 tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.

Sebagai perbandingan, berikut bunyi Pasal 1 UU No. 14 tahun 1992 “lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.”

Dari perbandingan di atas kita dapat melihat bahwa sebenarnya kedua pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok, karena inti sasaran dan tujuannya sama.

Djajoesman (1986:8) mengartikan lalu lintas adalah “pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem dan lain-lain, alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya”.

Demikianpun Perkins (Djajoesman, 1986:9) memberikan penjelasan perihal lalu lintas (*traffic*) sebagai pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jalan umum.

Dalam dunia lalu lintas ada tiga komponen utama dalam mewujudkan terjadinya lalu lintas, yaitu manusia, sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi seringkali disebabkan oleh si pengemudi sebagai salah satu komponen utama dalam lalu lintas. Pengemudi sering tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengemudikan kendaraan mereka. Disamping itu pengemudi juga terkadang melalaikan hal-hal yang diperlukan sebagai kelaikan jalan. Termasuk dalam hal ini adalah surat-surat kendaraan yang harus dipenuhi, tetapi terkadang tidak dipedulikan.

Dalam lalu lintas yang sering diperiksa oleh polisi adalah persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan antara lain adalah:

- a. Surat izin mengemudi;
- b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c. Surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d. Tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e. Tanda coba kendaraan bermotor.

Adapun pemeriksaan fisik kendaraan tersebut adalah sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, pemuatan, klakson, lampu-lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk keselamatan, perlengkapan dan peralatan lainnya.

2. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Mengingat UU No. 14 Tahun 1992 telah digantikan oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan disebutkan klasifikasi pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan tersebut.

1. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Jo. Pasal 36 UULAJ.
2. Memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Pasal 277 Jo. Pasal 50 ayat (1) UULAJ).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Pasal 278 Jo. Pasal 57 ayat (3) UULAJ).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu

keselamatan berlalu lintas. (Pasal 279 Jo. Pasal 58 UULAJ).

5. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 280 Jo. Pasal 68 ayat (1) UULAJ).
6. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat (1) UULAJ).
7. Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 282 Jo. Pasal 104 ayat (3) UULAJ).
8. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. (Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UULAJ).
9. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Pasal 285

ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).

10. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. (Pasal 287 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (4a) dan (4b) UULAJ).

11. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. (Pasal 287 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (4c) UULAJ).

12. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Pasal 287 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (4d) dan (4e) UULAJ).

13. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Pasal 287 ayat (5) Jo. Pasal 106 ayat (4g) atau Pasal 115 a UULAJ).

14. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia. (Pasal 288 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (5a) UULAJ).

15. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Pasal 288 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (5b) UULAJ).

16. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. (Pasal 290 Jo. Pasal 106 ayat (7) UULAJ).

17. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).

18. Mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. (Pasal 291 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).

19. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. (Pasal 293 ayat (1) Jo. Pasal 107 ayat (1) UULAJ).

20. Mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. (Pasal 293 ayat (2) Jo. Pasal 107 ayat (2) UULAJ).

21. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. (Pasal 294 Jo. Pasal 112 ayat (1) UULAJ).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat. (Pasal 295 Jo. Pasal 112 ayat (2) UULAJ).
23. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di Jalan. (Pasal 297 Jo. Pasal 115 b UULAJ).
24. Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. (Pasal 300 a Jo. Pasal 124 ayat (1c) UULAJ).
25. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UULAJ).
26. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. (Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (3) UULAJ).

27. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. (Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UULAJ).
28. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. (Pasal 310 ayat (4) UUALJ).
29. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. (Pasal 312 Jo. Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UULAJ).

D. Pengertian Remaja

pidana Istilah asing yang sering digunakan untuk menunjukkan masa remaja, menurut Yulia S.D. Gunarsa dan Singgih D. gunarsa (1991) antara lain : *puberteit*, *puberty*, dan *adolescentia*. Istilah *puberty* (bahasa inggris) berasal dari istilah latin, pubertas yang berarti kelakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat tanda kelaki-lakian.

Pubescence dari kata *pubis* (*pubic hair*) yang berarti rambut (bulu) pada daerah kemaluan, maka *pubescence* berarti perubahan yang dibarengi dengan tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan.

Santrock mendefenisikan pubertas sebagai masa pertumbuhan ulang-tulang dan kematangan seksual yang terjadi pada masa awal remaja. Stanley Hall, usia remaja antara 12 sampai usia 23 tahun.

Jadi remaja (*adolescence*) adalah masa transisi/peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Yang tergolong remaja ini berkisar antara usia 12/13-21 tahun. Untuk menjadi dewasa, mengutip pendapat Erikson maka remaja akan melalui masa krisis dimana remaja berusaha untuk mencari identitas diri.

Penggolongan remaja menurut Thornburg terbagi atas 3 tahap, yaitu: remaja awal (13-14 tahun), remaja tengah (15-17 tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun). Masa remaja awal umumnya individu telah memasuki pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan masa remaja tengah individu telah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dan remaja akhir umumnya sudah memasuki perguruan tinggi atau lulus SMA.

1. Aspek Perkembangan Remaja

a. Perkembangan Fisik

Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris dan ketrampilan motorik. Perubahan pada tubuh ditandai dengan penambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi.

Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif.

b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan Kognitif Menurut Piaget seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru.

Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak.

Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal.

Tahap formal operations adalah suatu tahap dimana seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan mencapai tahap operasi formal remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Berbeda dengan seorang anak yang baru mencapai tahap operasi konkret yang hanya mampu memikirkan satu penjelasan untuk suatu hal. Hal ini memungkinkan remaja berpikir secara hipotetis. Remaja sudah mampu memikirkan suatu situasi yang masih berupa rencana atau suatu bayangan. Remaja dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan pada saat ini dapat memiliki efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat membahayakan dirinya.

2. Kenakalan Anak/Remaja

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*" yang diartikan anak cacat sosial. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda;

merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Andi Mappiare menyatakan bahwa (Maidin Gultom, 2008:56):

Remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orangtua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orangtua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. Remaja sedang berada dalam proses berkembang kearah kematangan atau kemandirian, remaja memerlukan bimbingan karena mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.

Berikut ini adalah wujud perilaku delinkuen, antara lain:

- a. Kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman milieu sekitar.

- c. Perkelahian antargang, antarkelompok, antarsekolah, dan kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan, atau bersembunyi di tempat terpencil untuk eksperimen kedurjanaan dan tindak asusila.
- e. Mengintimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya.
- f. Berpesta pora dan mabuk-mabukan, seks bebas, melakukan kekacauan yang mengganggu lingkungan.
- g. Perkosaan, pembunuhan dengan motif seksual, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita, dan lain-lain.
- h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotik yang erat bergandengan dengan kejahatan.
- i. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar, ada seks dan cinta tanpa kendali.
- j. Homoseksualitas, erotisme, anal dan oral, dan gangguan seksual pada anak remaja disertai tindakan sadis.
- k. Perjudian dengan bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.

- I. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu yang tidak kawin.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita, 1982:66) yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the *first crime*
Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus

berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita, 1982:79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang

cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk

perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdulsyani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih

buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani (1987:141) sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya

masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, yaitu tepatnya di kantor Kepolisian Polres Pangkep.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu remaja yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggaran lalu lintas dan menelaah sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, literature bacaan, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu melakukan penelitian langsung di lokasi untuk pengumpulan data dari responden dalam hal ini pelaku dan aparat, serta pihak-pihak yang terkait dengan dengan objek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratannya untuk membantu penulis dalam mengembangkan topik bahasan yang berkaitan objek penelitian.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Remaja Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pangkep.

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, artinya berbicara tentang kenakalan remaja, dimana berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan/pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Romli Atmasasmita (1983:46) bentuk motifasi itu ada dua macam, yaitu: motifasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksud dengan motifasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.

Data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Polres Pangkep tahun 2013 sampai dengan tahun 2014

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2013	2187
2	2014	1756

Sumber : Data Polres Pangkep 2014

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Briptu. Muhammad Nur Amiruddin , Selaku Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kabupaten Pangkep Unit Satuan Lalu Lintas, Pangkep, 10 Oktober 2014. Menurutnya faktor-faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas ialah

- 1) Tidak adanya pengawasan dari orang tua
- 2) Banyaknya anak dibawah umur yang sudah menggunakan sepeda motor.
- 3) Kurangnya kesadaran bagi remaja dalam berlalu lintas yang benar.
- 4) Tidak adanya tindakan tegas dari pihak sekolah untuk menegur siswanya yang tidak memiliki SIM untuk tidak membawa kendaraannya ke sekolah.

Selanjutnya dibawah ini adalah beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pangkep menurut Briptu. Muhammad Nur Amiruddin, yakni :

1. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).
2. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat (1) UULAJ).
3. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 288 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (5a) UULAJ).

Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polres Pangkep, konsentrasi penulis dalam hal ini ingin mengemukakan kasus pelanggaran yang terjadi pada anak. Akibat terjadinya

pelanggaran berlalu lintas, penulis menemukan beberapa faktor penyebab di antaranya : *Indiscipline Factor* (faktor ketidakdisiplinan), Faktor Kealpaan/Lupa, *Ignorance Factor* (faktor ketidaktahuan), Faktor Kelalaian dan Faktor Sarana/Prasarana Jalan.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut sebagai berikut :

a) *Indiscipline Factor* (Faktor Ketidakdisiplinan)

Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep.

Selain itu pelanggar kadang menerobos *traffic light* dan tidak memperhatikan bahwa ada polisi yang berjaga di sekitar *traffic light* tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang pengendara hanya mematuhi peraturan lalu lintas apabila ketika melihat polisi yang sedang berjaga ataupun berpatroli di jalanan. Pengendara juga kadang tidak memakai helm dan membawa perlengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK apabila jarak tempuh tujuan relatif dekat dari rumahnya. Faktor ketidakdisiplinan inilah yang paling banyak dilakukan oleh pengendara di Kabupaten Pangkep.

b) Faktor Kealpaan/Lupa

Sebagai seorang manusia tentu kita pernah melakukan khilaf atas apa yang telah diperbuat. Tanpa terkecuali terhadap pelanggaran lalu lintas yang juga kebanyakan pengendara melupakan hal-hal penting dalam berlalu lintas seperti lupa membawa SIM dan STNK karena karena terburu-buru.

c) *Ignorance Factor* (Faktor Ketidaktahuan)

Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas. Seperti contoh, diharuskan memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat dan memakai helm bagi pengendara roda dua.

Ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak mengetahui peraturan dan marka/rambu lalu lintas. Seperti contoh, seorang pengendara melintasi jalan yang sudah jelas terdapat larangan untuk melintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas.

d) Faktor Kelalaian

Dalam hal berlalu lintas, faktor kelalaian merupakan salah satu faktor yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Karena akibat dari kelalaian tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya, pengendara yang ngebut di jalan raya dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan dirinya sendiri yang mungkin pula dapat berimbas kepada pengguna jalan lain.

e) Faktor Sarana/Prasarana Jalan

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor ketidakdisiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman, dan

faktor kelalaian, tetapi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses dalam berlalu lintas.

Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik, marka/rambu jalan maupun alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*) yang kurang baik ataupun rusak yang menyebabkan banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adapun nilai-nilai yang Menjadi Penyebab Remaja Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Nilai Intrinsik Dari Kenakalan Remaja adalah :

a. Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung sebagaimana hasil dari penelitian penulis melalui wawancara terhadap polisi selaku penyidik mengenai faktor apakah yang mempengaruhi sehingga anak melakukan pelanggaran lalu lintas, (Briptu. Muhammad Nur Amiruddin, Pangkep, 10 Oktober 2014) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pelanggaran lalu merah kendaraan dilarang melintas. Dan yang dimaksud peran keluarga disini yaitu seorang remaja masih membutuhkan pengawasan dan lintas yaitu: perilaku seseorang tidak disiplin berlalulintas, peran keluarga sangat penting, emosional si remaja dan pengetahuan. Dari wawancara tersebut yang dikatakan perilaku seseorang tidak disiplin berlalu lintas yakni tidak menaati aturan lalu lintas, misalnya pada saat lampu pemahaman yang lebih mengenai berkendara. Dari sisi emosional yaitu si remaja masih belum cukup mengerti aturan dan

akibat berlalu lintas sehingga si remaja slalu ingin mencoba, dan remaja tersebut berani membawa kendaraan di jalan. Dari segi pengetahuan si remaja juga belum tahu bahayanya berlalu lintas jika tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor intelegensia/pengetahuan yang kurang oleh si remaja mengenai peraturan tentnag lalu lintas dan resiko dalam mengendarai kendaraan tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini bisa menjadi motifasi dari si remaja dalam mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum dibolehkan.

b. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan , tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang remaja.

JumlahPelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkep Berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2013-2014.

No	Tingkat Pendidikan	Tahun	
		2013	2014
1	SMP	604	572
2	SMA	515	473
3	Perguruan Tinggi	81	90
4	AnakPutus Sekolah	429	341
Jumlah		1629	1476

Sumber : Data Polres Pangkep 2014

Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pangkep berdasarkan jenis pelanggaran tahun 2013-2014 dapat dilihat pada table berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2013	2014
1	Kecepatan	41	11
2	Marka Rambu	323	180
3	Surat-surat	685	594
4	Perlengkapan	315	657
Jumlah		1364	1442

Sumber : Data Polres Pangkep 2014

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas paling banyak dilakukan oleh anak yang berlatar pendidikan SMP, SMA dan kategori putus sekolah dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Dimana kisaran usia SMP adalah 13-15 tahun, SMA adalah 16-18 tahun. Dengan demikian usia 13-18 tahun adalah usia yang paling rawan terjadinya kenakalan remaja, apalagi dalam hal pelanggaran ketertiban. Adapun hasil wawancara penulis terhadap 10 (sepuluh) orang remaja di Kabupaten Pangkep 4 (empat) diantaranya merupakan anak SMA yang berusia 16 tahun, 6 (enam) lainnya masing-masing berusia 13, 14 dan 15 tahun, yang mana 10 (sepuluh) remaja tersebut sudah dapat mengendarai sepeda motor sejak usia 9-13 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada

kenyataannya remaja di usia 13 tahun yang tergolong usia yang sangat belia sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum diperbolehkan.

2. Nilai Ekstrinsik Kenakalan Remaja Meliputi :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya remaja mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, sebagaimana hasil wawancara penulis mengenai apakah peranan keluarga berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja? Adapun ((Briptu. Muhammad Nur Amiruddin, Pangkep, 10 Oktober 2014) mengatakan bahwa benar, pengaruh keluarga sangat penting terhadap si remaja. Dan jangan pernah memberikan kendaraan kepada si remaja sebelum cukup umur karena awal dari kecelakaan adalah pelanggaran. Selanjutnya ((Briptu. Muhammad Nur Amiruddin, Pangkep, 10 Oktober 2014) mengatakan bahwa peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Dari jawaban kepolisian menegaskan bahwa keluarga memiliki arti yang sangat penting.

Sebagaimana dalam hasil wawancara penulis terhadap pelaku/remaja mengenai siapa yang mengajarkan mengendarai kendaraan bermotor dan apakah orang tua mereka mengetahuinya, 10 sumber (remaja) mengatakan bahwa orang tua mereka mengetahui bahwa mereka bisa mengendarai kendaraan bermotor, bahkan 4 diantaranya diajari oleh orang tua/keluarga mereka. Dari kedua hasil wawancara penulis baik dari pihak kepolisian selaku penegak hukum dan remaja sebagai pelaku, penulis menyimpulkan bahwa remaja berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Dari sinilah dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si remaja akan lebih terarah, selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan remaja itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si remaja tidak mungkin

membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

b. Faktor Pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para remaja, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan remaja, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan remaja secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks demikian , sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si remaja itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara remaja dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang negative terhadap perkembangan mental si remaja sehingga remaja menjadi delikuen.

Sebagai hasil wawancara penulis terhadap Briptu. Muhammad Nur Amiruddin, Pangkep, 10 Oktober 2014, mengatakan bahwa perilaku dari remaja itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari jawaban kepolisian sudah jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa

kendaraan ke sekolah. Adapun hasil wawancara penulis terhadap pelaku/remaja yang merupakan siswa SMP dan SMA yang berjumlah 10 orang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak dilarang oleh pihak sekolah untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah, oleh karena itu mereka pun membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan diantara mereka ada yang masih berusia 16 tahun namun telah memiliki SIM yang mana seharusnya belum dapat memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun sebagaimana standar usia untuk memiliki SIM dalam Undang-undang lalu lintas. Dari hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah. Dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku si remaja.

c. Faktor Pergaulan Remaja.

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut.

Remaja menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Para remaja

menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas remaja bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan remaja tadi benar-benar menjadi nakal. Adapun hasil wawancara penulis terhadap 10 sumber (remaja) 6 diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh dari teman-temannya, hal ini berarti pergaulan remaja menjadi salah satu faktor penyebab remaja menjadi berani membawa kendaraan bermotor diusianya yang masih dini dan berpotensi membuat remaja tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini contohnya balapan, melanggar lalu lintas dan cenderung tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan remaja tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik remaja agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

B. Faktor-faktor Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pangkep.

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di hadapannya terdapat tikungan yang berbahaya, akan dapat mencegah kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kalau tidak, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Untuk itu upaya penanggulangan pihak Satlantas Polres Pangkep melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patroli-patroli

rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patrol rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Pangkep menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi para remaja. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya pencegahan yang baik untuk remaja diusia dini, dimana upaya tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

2. Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para remaja yang belum cukup umur dan/atau remaja yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Pangkep guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

- 1) Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- 2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- 3) Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
- 4) Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas

yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

- 5) Meningkatkan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- 6) Satlantas Polres Pangkep juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun kegiatan Satlantas Polres Pangkep dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

1) Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

2) Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3) Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polres Pangkep kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujuan akan tercapa sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polres Pangkep. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Adapun dalam (Achmad Ruslan, 2011:71) factor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat factor efektifitas yaitu:

a. Kaidah Hukum Atau Peraturan Itu Sendiri.

Dalam hal ini apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur mengenai lalu lintas sudah cukup? Dari peraturan perundang-undangan yang ada tentang peraturan lalu lintas dan Angkutan jalan yang terbaru yakni tahun 2009 menjadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas menjadi komplis dan sesuai dengan kondisi masa kini.

b. Petugas Yang Menegakkannya

Petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, karena walaupun peraturannya sudah baik tetapi penegak hukum kurang baik maka akan timbul masalah. Demikian pula sebaliknya jika peraturannya kurang baik tetapi petugas penegakknya baik dapat pula menimbulkan masalah. Dalam hal ini meskipun peraturan mengenai lalu lintas sudah sangat baik tapi petugas penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik maka potensi pelanggaran lalu lintas akan selalu ada. Dari hasil penelitian penulis hal ini benar adanya karena peraturan mengenai lalu lintas yang tertuang dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sangat baik. Namun pelanggaran lalu lintas masih tetap saja rawan terjadi hal ini tidak terlepas dari peranan penegak hukum yang tidak begitu tegas atau tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ruang lingkupnya terutama berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya kertas, tinta, kendaraan, computer dan sebagainya. Dalam hubungan ini kerap kali suatu peraturan sudah

diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut tersedia.

Hal demikian ini dapat terjadi bahwa suatu peraturan diadakan untuk memperlancar proses tetapi karena fasilitas tidak cukup, maka yang akan terjadi adalah justru kemacetan-kemacetan. Seperti halnya, kurang motor BM dalam hal memperlancar polisi dalam melakukan patrol, pengawasan dan pengejaran apabila ada pelanggar yang mencoba menghindar atau melarikan diri. Dengan demikian fasilitaspun menjadi sangat penting.

d. Warga Masyarakat Yang Terkena Ruang Lingkup Peraturan Tersebut

Warga masyarakat sebaiknya bisa berkerjasama dengan aparat kepolisian dalam mematuhi segala peraturan yang ada agar tercipta efektifitas hukum.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Pangkep tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dengan demikian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Pangkep adalah faktor ketidakdisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian.
2. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukan tindakan berupa teguran, penyitaan dan penilangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melihat pada angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan, maka dengan ini pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan aturan dalam berlalu lintas agar tahun-tahun berikutnya jumlah pelanggaran semakin berkurang sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap aturan berlalu lintas.
2. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah harus ditingkatkan mengingat angka pelanggaran yang dilakukan oleh anak masih sangat tinggi.
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar yang tidak patuh terhadap aturan.
4. Diharapkan pemerintah menambah dana yang dianggarkan demi terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja karya.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Bandung: Penerbit Chandra Grafika Pratama.
- Agoes Dariyo. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad A.K. Muda. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Reality Publisher.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. dan Christine S.T Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H.S. Djajoesman. 1986. *Polisi dan Lalu Lintas*. Cetakan Kedua.
- J.E. Sahetapy dan Reksodiputro. 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Surabaya: Rajawali.
- Kartini Kartono. 2010. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaun. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali.

R. Soesilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.

Ramli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbit UMI.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website

<http://www.scribd.com/doc/4948323/Remaja>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4130/PEMBAHASAN.docx?sequence=5>

www.wikipedia.org

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT PANGKEP
Jalan Cempaka No. 01 Pangkajene

Pangkajene, 17 Oktober 2014

Nomor : B/ 80 / X / 2014 / Lantas
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penelitian

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Di

Makassar

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Rencana Kerja Sat Lantas Polres Pangkep tahun 2014.

2. Bahwa benar mahasiswa fakultas Hukum Unhas
 - Nama : Muh.Akbar Ali
 - No.pokok : B 11107918
 - Program Studi : Ilmu Hukum
 - Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
 - Alamat : Btn Wesabbe Blok C No.24

Telah melaksanakan Penelitian di Polres pangkep Terhitung dari tanggal 06 s/d 17 Oktober 2014 yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh remaja (Studi kasus di wilayah Hukum Polres Pangkep Tahun 2010-2013)

3. Demikian atas perhatian dan bantuannya Kami ucapkan terima kasih.

KASAT LANTAS LANTAS POLRES PANGKEP



Tembusan :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. Mahasiswa tsb.
3. Arsip

HASANUDDIN, S.Sos

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 69090481